



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 100.3.3.2/ 2388/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Kepala Perangkat Daerah menyusun rencana pembentukan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program tersebut diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal *31 Desember 2024*



PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2025

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERU BAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Perbup	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi: pendapatan, belanja dan pembiayaan	✓		2025	Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun setelah selesai proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah audited selesai	BPPKAD	Mei 2025	
2.	Perbup	Penjabaran APBD 2026	Penjabaran APBD yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah	✓		2025	Perbup Penjabaran APBD disusun setelah Perda APBD ditetapkan, yaitu maksimal bulan Desember tahun n-1	BPPKAD	Desember 2025	
3.	Perbup	Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemkab Rembang Tahun 2026	Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan	✓		2025	Sebagai dasar penilaian MCP KPK, Perbup Analisis Standar Belanja harus sudah ditetapkan maksimal 1 Juli	BPPKAD	April 2025	
4.	Perbup	Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemkab Rembang Tahun 2026	Pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemkab Rembang untuk menyusun biaya komponen masukan	✓		2025	Sebagai dasar penilaian MCP KPK, Perbup Standar Harga Satuan harus sudah ditetapkan maksimal 1 Juli	BPPKAD	April 2025	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		2026	Rembang untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah tahun 2026				sudah ditetapkan maksimal 1 Juli			
5.	Perbup	Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian	Balai Penyuluhan Pertanian	✓		2025	Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Dintanpan		
6.	Perbup	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029	1. Maksud dan tujuan 2. Ruang lingkup 3. Sistematika penyusunan 4. Pemantauan dan evaluasi	✓		2025-2029	Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 merupakan amanat Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, didalam pada Pasal 13 dinyatakan salah satu tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) adalah penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk periode 5 tahun. Didalam Pasal 20 juga menyatakan RPKD kabupaten menjadi bagian dari RPJMD	1. Bappeda 2. Dinsos PPKB 3. Dinas Permadess 4. Dindukcapil 5. Dinas Kesehatan	Januari 2025	1. Dokumen RPKD 2025-2029 telah selesai disusun 2. TKPKD Kabupaten Rembang berdasarkan SK Bupati Nomor 400.9.10/1318/2024 tentang pembentukan TKPKD Kabupaten Rembang Tahun 2024
7.	Perbup	Perubahan atas Peraturan Bupati	1. Pembentukan dan keanggotaan		✓	2025	Penyusunan Peraturan Bupati	1. Bappeda 2. Dinsos	Maret 2025	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN	
				BARU	PERU BAHAN						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
		Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang	2. Tata kerja 3. Penyelarasan kerja 4. Pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia 5. Pendanaan 6. Pelaporan				tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang disusun untuk menindaklanjuti Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan SDM Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota sehingga diperlukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang	PPKB 3. Dinas Permadess 4. Dindukcapil 5. Dinas Kesehatan			

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERU BAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8.	Perbup	Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2029	1. Visi dan Misi Pembangunan SPAM 2. Sasaran Pembangunan SPAM 3. Arah Kebijakan dan Strategi 4. Kerangka Pendanaan 5. Kerangka Kelembagaan	✓		2025	Jakstrada kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM di kabupaten dalam meningkatkan akses air minum untuk mencapai sasaran pembangunan air minum layak dan aman di tingkat kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun. JAKSTRADA-SPAM bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional pengembangan SPAM melalui rencana, program dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efisien dan efektif	1. DPUTaru 2. Dinkes 3. Dinpermades 4. Bagian Hukum 5. Bagian Perekonomian dan SDA 6. PDAM	September 2025	
9.	Perbup	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	1. Rencana Umum 2. Rencana Jaringan 3. Program dan kegiatan pengembangan dalam penyusunan rencana induk 4. Kriteria dan standar	✓		2025	Risparm adalah dokumen perencanaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu	1. DPUTaru 2. Dinkes 3. Dinpermades 4. Bagian Hukum 5. Bagian Perekonomian dan SDA	November 2025	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERU BAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			pelayanan 5. Rencana sumber dan alokasi air baku 6. Skala prioritas pembangunan sumber air 7. Rencana keterpaduan dan prasarana dan sarana sanitasi				periode, yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya	6. PDAM		
10.	Perbup	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun, prakiraan maju	✓		2025	Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun	40 OPD	Juni 2025	
11.	Perbup	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Renja PD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat	✓		2025	Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun	40 OPD	Juli 2025	Maksimal 1 (satu) bulan setelah penetapan Perbup RKPD Tahun 2026
12.	Perbup	Perubahan Rencana	Perubahan Rencana		✓	2025	Dokumen perubahan	40 OPD	Juli 2025	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERU BAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Kerja Pemerintah Daerah (P RKPD) memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun, Prakiraan maju				perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun			
13.	Perbup	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Renstra PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah	✓		2025	Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun	40 OPD	September 2025	Maksimal 1 bulan setelah penetapan Perda RPJMD Tahun 2025-2029
14.	Perbup	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Mengatur tentang tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		✓	2025	Perlu penyesuaian dengan peraturan terbaru terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional	Dinkominfo	April 2025	
15.	Perbup	Komunitas Informasi Masyarakat	Mengatur tentang tata kelola kemitraan	✓		2025	Perlu peraturan terkait Komunitas Informasi	Dinkominfo	Maret 2025	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERU BAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat (kelembagaan, pemetaan, kolaborasi kegiatan dan monitoring evaluasi efektifitas diseminasi informasi)				Masyarakat			
16.	Perbup	Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (PPM)	Peraturan pelaksanaan ditingkat daerah tentang pengurangan dan penghapusan merkuri, sebagai mandat Pepres Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Pengurangan dan Penghapusan Merkuri bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan dari emisi dan lepasan akibat merkuri dan senyawa merkuri yang berasal dari manusia	✓		2025	Peraturan Bupati untuk pengurangan dan penghapusan merkuri, diintegrasikan dalam RPJMD	1. DLH 2. DKK 3. Dinperin naker (apabila ada industri yang menggunakan/merupakan merkuri)	Juli 2025	Usulan Tahun 2024 mundur ke Tahun 2025 karena ada revisi kajian dari Provinsi

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN	
				BARU	PERU BAHAN						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
17.	Perbup	Pemanfaatan Fasilitas Publik Alun-alun Rembang dan Alun-alun Lasem	Peraturan pelaksanaan di tingkat daerah tentang pemanfaatan fasilitas publik alun-alun Rembang dan alun-alun Lasem	✓		2025	<ul style="list-style-type: none"> - Alun-alun sebagai pusat area publik - Prosedur penggunaan alun-alun - Tugas dan tanggung jawab DLH - Tugas dan tanggung jawab pemohon - Menerangkan ketentuan pemanfaatan/ peminjaman RTH alun-alun Rembang dan alun-alun Lasem 	DLH	Mei 2025		
18.	Perbup	Pengelolaan Jalur Hijau	Peraturan pelaksanaan di tingkat daerah tentang perlindungan pohon peneduh turus jalan	✓		2025	<ul style="list-style-type: none"> - Fungsi pohon peneduh turus jalan sebagai fungsi estetika, kenyamanan, keteduhan, keamanan dan penjerat polusi - Tugas dan tanggung jawab DLH dan peran serta masyarakat - Perlindungan pohon turus jalan - Prosedur permohonan pemangkasan/ pemotongan pohon - Tanggungjawab 	DLH	Mei 2025		

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERU BAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							pemohon atas pemangkasan/ pemotongan pohon - Menerangkan ketentuan perlindungan/ perawatan pohon turus jalan dan ketentuan penebangan pohon turus jalan yang diperbolehkan serta ketentuan sanksi bagi oknum perusak pohon turus jalan			
19.	Perbup	SOTK UPT Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten	Tupoksi pekerjaan UPT Pengelolaan Sampah	✓		2025	Untuk menunjang dan sebagai pedoman melakukan suatu pekerjaan	DLH	November 2025	
20.	Perbup	Perubahan ke-5 atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang	Pengaturan kembali (penyesuaian) pemberian TPP Pegawai ASN, Penjabat Kepala Desa sebelumnya tidak diberikan TPP diubah, penyesuaian besaran TPP Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah dan Bagian PBJ Setda	✓		2025	Sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang	Bagian Organisasi Setda	Januari 2025	
21.	Perbup	Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di	Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan	✓		2025	Sebagai dasar penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana di	Bagian Organisasi Setda	Januari 2025	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERU BAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang	Keputusan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 dan Penetapan Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan terkait				Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang			
22.	Perbup	Kelas Jabatan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang	Penyesuaian Kelas Jabatan Pegawai ASN berdasarkan Validasi Hasil Persetujuan Evaluasi Jabatan dari Kementerian PANRB	✓		2025	Sebagai dasar penetapan Kelas Jabatan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang	Bagian Organisasi Setda	Januari 2025	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020
23.	Perbup	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPERIDA	Mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BAPPERIDA berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang	✓		2025	Sebagai dasar pembentukan BAPPERIDA Kabupaten Rembang	Bagian Organisasi Setda	Januari 2025	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPEDA

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERU BAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang							
24.	Perbup	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKPSDM	Mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BKPSDM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang	✓		2025	Sebagai dasar pembentukan BKPSDM Kabupaten Rembang	Bagian Organisasi Setda	Januari 2025	Mencabut Peraturan Bupati Rembang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKD
25.	Perbup	Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada DINSOSPPKB Kabupaten Rembang	Pembentukan UPTD PPA pada DINSOSPPKB untuk melaksanakan tugas teknis operasional dalam meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	✓		2025	Sebagai dasar pembentukan UPTD PPA di Kabupaten Rembang	Bagian Organisasi Setda	Februari 2025	
26.	Perbup	Sistem Kerja	Penyesuaian sistem kerja sebagai tindak	✓		2025	Sistem kerja baru dengan	Bagian Organisasi	Maret 2025	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERU BAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			lanjut penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi				pembentukan tim-tim kerja.	Setda		
27.	Perbup	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang	Pengaturan kembali Tata Naskah Dinas berdasarkan Peraturan MENDAGRI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.	✓		2025	Sebagai pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi Setda	April 2025	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
28.	Perbup	Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang	Pengaturan kembali Pakaian Dinas berdasarkan Peraturan MENDAGRI Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	✓		2025	Sebagai pedoman penggunaan Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi Setda	Mei 2025	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Pegawai ASN Daerah
29.	Perbup	Hari Kerja dan Jam Kerja Pemerintah Daerah dan Pegawai Instansi Pemerintah	Penyesuaian Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah	✓		2025	Sebagai pedoman Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi	Bagian Organisasi Setda	Juni 2025	Mencabut Peraturan Bupati Nomor

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERU BAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		ASN Daerah	Daerah dan Pegawai ASN Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN				Pemerintah dan Pegawai ASN Daerah			59 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
30.	Perbup	Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Rencana Aksi Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang	Pengaturan teknis/tata cara penyusunan Perjanjian Kinerja Pegawai ASN, Rencana Aksi Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang	✓		2025	Sebagai pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang	Bagian Organisasi Setda	Juli 2025	
31.	Perbup	Pembentukan UPT Balai Latihan Kerja pada DINPERINNAKER	Mengubah status UPT BLK pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		✓	2025	Mengubah status UPT BLK pada DINPERINNAKER	1. Bagian Organisasi Setda 2. Dinperin-naker	Agustus 2025	
32.	Perbup	UPT Pengelolaan Sampah	Penyesuaian uraian tugas UPT Pengelolaan Sampah		✓	2025	Penyesuaian uraian tugas UPT Pengelolaan Sampah	1. Bagian Organisasi Setda 2. Dinperin-naker	September 2025	
33.	Perbup	Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029	Penyesuaian Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan	✓		2025	Sebagai pedoman implementasi RB Pemda dan Perangkat Daerah berdasar pada RPJMD 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat	Bagian Organisasi Setda	Oktober 2025	Menggantikan Road Map RB Pemda Tahun 2021-2026

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERU BAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			reformasi birokrasi yang berdampak serta fokus pelaksanaan reformasi birokrasi dan penajaman indikator reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PANRB tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2025-2029				Daerah			
34.	Perbup	Pinjaman lunak bagi usaha mikro melalui penugasan kepada PT. BPR BKK Lasem (PERSERO DA), PT. BPR JATENG (PERSERO) dan PT. BPR BANK REMBANG		✓		2025	Pinjaman lunak BKK	Dindagkop UKM		Raperbup ini akan ditindaklanjuti jika masuk APBD Tahun 2025/masih diusulkan dalam pembahasan RAPBD 2025
35.	Perbup	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	- Lingkungan penataan pedagang kaki lima - Pendataan pedagang kaki lima - Pemutakhiran data - Pendaftaran pedagang kaki lima - Permohonan	✓		2025	- Lingkungan penataan pedagang kaki lima - Pendataan pedagang kaki lima - Pemutakhiran data - Pendaftaran pedagang kaki lima - Permohonan tanda	Dindagkop UKM	Desember 2025	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN	
				BARU	PERU BAHAN						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			<ul style="list-style-type: none"> - tanda daftar usaha (TDU) atau kartu identitas pedagang kaki lima - Penetapan lokasi pedagang kaki lima - Relokasi pedagang kaki lima - Kelembagaan susunan keanggotaan, fungsi dan tugas Tim Koordinasi Penataan - Tata cara kelembagaan - Perlindungan masyarakat - Pengawasan dan evaluasi - Pembinaan - Tata cara pembayaran denda 				<ul style="list-style-type: none"> - daftar usaha (TDU) atau kartu identitas pedagang kaki lima - Penetapan lokasi pedagang kaki lima - Relokasi pedagang kaki lima - Kelembagaan susunan keanggotaan, fungsi dan tugas Tim Koordinasi Penataan - Tata cara kelembagaan - Perlindungan masyarakat - Pengawasan dan evaluasi - Pembinaan - Tata cara pembayaran denda 				
36.	Perbup	Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum, Pelayanan Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum: - Lokasi parkir - Pengelolaan parkir - Tata cara pemungutan - Tata cara penundaan pembayaran - Tata cara pengurangan, 	✓		2025	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi parkir tepi jalan umum meliputi ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi parkir, dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka jalan - Pengelolaan parkir dilaksanakan oleh 	Dinas Perhubungan	Desember 2025		

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERU BAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			keringanan, dan pembebasan				Dinas dan dibantu oleh Petugas Parkir yang ditunjuk oleh Dinas			
			Pelayanan tempat khusus parkir:				- Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas			
			- Lokasi tempat khusus parkir				- Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang disediakan dan berada di lokasi milik Pemerintah Daerah			
			- Pengelolaan parkir				dilaksanakan oleh Dinas			
			- Tata cara pemungutan				- Lokasi terminal adalah terminal tipe C di Kabupaten Rembang			
			- Tata cara penundaan pembayaran							
			- Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan							
			Pelayanan Fasilitas Lainnya di lingkungan terminal:							
			- Lokasi Terminal							
			- Tata cara pemungutan							
			- Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran							
			- Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan							
37.	Perbup	Monev Mandiri Perdesaan dan	Pedoman Pelaksanaan Monev	✓		2025	Penguatan pelaksanaan monev	Dinpermades	Juli 2025	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERU BAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Keterbukaan Informasi Publik (MMP-KIP)	Mandiri Perdesaan dan Keterbukaan Informasi Publik				berbasis masyarakat (partisipatif) dan publikasi hasil pelaksanaan monev melalui media cetak, elektronik dan digital			
38.	Perbup	Batas Wilayah Desa	Batas Wilayah dan Peta Desa	✓		2025	Untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa	Dinpermades	Oktober 2025	173 Perbup Batas Desa
39.	Perbup	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	✓		2025	Memberikan penjelasan terkait pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Dinpermades	Oktober 2025	
40.	Perbup	Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD)	Tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa	✓		2025	Memberikan penjelasan tentang tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD)	Dinpermades	Oktober 2025	
41.	Perbup	Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	✓		2025	Memberikan kejelasan Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinpermades	Oktober 2025	
42.	Perbup	Teknis Penggunaan Dana Desa	Petunjuk Penggunaan Dana Desa	✓		2025	Menjelaskan Petunjuk Penggunaan Teknis Dana Desa	Dinpermades	Oktober 2025	
43.	Perbup	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan	Perencanaan Pelaksanaan Pengelolaan	PBJ, LPSE,	✓	2025	Pengaturan penguatan pengelolaan PBJ di	Bagian PBJ Setda	Juni 2025	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERU BAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pemerintah Kabupaten Rembang	SDM dan Advokasi PBJ				Kabupaten Rembang			
44.	Perbup	Petunjuk Pelaksanaan Mutasi PNS	Pelaksanaan mutasi	✓		2025	Menunggu regulasi dari pusat (Menpan RB dan BKN)	BKD	Juli 2025	
45.	Perbup	Pedoman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Tata cara pengisian kekosongan JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang	✓		2025	Menunggu regulasi dari pusat (Menpan RB dan BKN)	BKD	Juli 2025	
46.	Perbup	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang	1. Tata kelola korporasi 2. Tata kelola klinik	✓		2025		RSUD dr. R. Soetrasno	April 2025	Perubahan: 1. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola RSUD dr. R. Soetrasno Rembang 2. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 24 Tahun 2009 tentang

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERU BAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Pola Tata Kelola RSUD dr. R. Soetrasno Rembang
47.	Perbup	Pelaksanaan Penegakan Ketertiban Umum di Kabupaten Rembang	Penegakan ketertiban umum	✓		2025	Pelaksanaan Penegakan Ketertiban Umum di Kabupaten Rembang	Satpol PP	Juli 2025	
48.	Perbup	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	a. Pelaksanaan Bantuan Hukum; b. Pemberi Bantuan Hukum; c. Penerima Bantuan Hukum; d. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; e. Penganggaran Dana Bantuan Hukum; f. Pelaporan Bantuan Hukum; g. Standar Bantuan Hukum; h. Larangan; i. Pengawasan; j. Pendanaan; k. Sanksi Administratif; l. Ketentuan Penutup.	✓		2025	a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; b. mewujudkan pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan; dan c. memberikan hak kompensasi kepada pemberi Bantuan Hukum.	Bagian Hukum Setda	Januari 2025	
49.	Perbup	Penjelasan Perda KTR	Penjelasan Kawasan Bebas Bebas Asap Rokok	✓		2025	Penjelasan terkait Perda KTR	Dinas Kesehatan	Februari 2025	
50.	Perbup	Perubahan atas	Unit Kesehatan		✓	2025	Perubahan dan	1. Dinas	Februari 2025	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERU BAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	Sekolah/Madrasah				pembaharuan peraturan terkait Unit Kesehatan Sekolah dan Madrasah	Kesehatan 2. Dindikpora		
51.	Perbup	Inovasi FKD dalam RDS Kabupaten	Kader Kesehatan	✓		2025	Inovasi Kader Forum Kesehatan Desa/Kelurahan dan Posyandu	1. Dinas Kesehatan 2. Kecamatan	Februari 2025	
52.	Perbup	Inovasi Kabeh Marem STBM	Kabupaten Sehat	✓		2025	Inovasi terkait Tim STBM	Dinas Kesehatan	Februari 2025	
53.	Perbup	Inovasi Telponi AKI/AKB	Penanggulangan Kematian Ibu dan Bayi	✓		2025	Inovasi Tim Telponi Kematian Ibu dan Bayi	Dinas Kesehatan	Februari 2025	
54.	Perbup	Inovasi Telponi Stunting	Penanggulangan Balita Stunting	✓		2025	Inovasi Tim Telponi Balita Stunting	Dinas Kesehatan	Februari 2025	
55.	Perbup	Inovasi Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis	Percepatan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis	✓		2025	Inovasi Percepatan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Februari 2025	
56.	Perbup	Penyelenggara Jamaah Haji	Pembentukan Tim Kesehatan Jamaah Haji	✓		2025	Tim Penyelenggaraan Kesehatan Jamaah Haji	1. Dinas Kesehatan 2. Kemenag	Februari 2025	
57.	Perbup	Standar Pelayanan Minimum	Standar Pelayanan Tahun 2025	✓		2025	Standar Pelayanan Minimum Kesehatan Tahun 2025	Dinas Kesehatan	Februari 2025	
58.	Perbup	Tarif Layanan Puskesmas dan Dinas Kesehatan	Perubahan Tarif Layanan Kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan	✓		2025	Tarif Layanan Kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan	1. Dinas Kesehatan 2. Puskesmas	Februari 2025	
59.	Perbup	Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan		✓		2025		BPPKAD	Januari 2025	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERU BAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Perkotaan								
60.	Perbup	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang		✓		2025		BPPKAD	Januari 2025	
61.	Perbup	Lembaga Kemasyarakatan Desa		✓		2025		Dinpermades	Januari 2025	
62.	Perbup	Pedoman Pengawasan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Rembang		✓		2025		Inspektorat	Februari 2025	
63.	Perbup	Pelayanan Tera dan Tera Ulang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Tera dan Tera ulang - Penggolongan UTTP berdasarkan kewajiban tera - Pembiayaan kegiatan tera dan tera ulang - Hubungan kerja dengan pihak ketiga - Pengawasan terhadap UTTP, BDKT dan satuan ukuran 	✓		2025	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang lingkup, tata cara, pelaksana - Pembagian terhadap UTTP yang wajib dan bebas tera dan tera ulang - Pembebanan pembiayaan pelayanan tera dan tera ulang - Pemberian wewenang dan izin pelaksanaan reparasi UTTP 	DINDAGKOP UKM	Februari 2025	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERU BAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							- oleh pihak ketiga Pengawasan terhadap penggunaan UTTP, pelabelan BDKT dan penggunaan satuan ukuran oleh masyarakat			
64.	Perbup	Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah		✓		2025		BPPKAD	Februari 2025	
65.	Perbup	Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet		✓		2025		BPPKAD	Februari 2025	
66.	Perbup	Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		✓		2025		BPPKAD	April 2025	
67.	Perbup	Tata Cara Pemberian Keringanan Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah		✓		2025		BPPKAD	April 2025	
68.	Perbup	Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB		✓		2025		BPPKAD	April 2025	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN	
				BARU	PERU BAHAN						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
69.	Perbup	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Bagan Akun Standar (BAS)		✓	2025		BPPKAD	Juni 2025		
70.	Perbup	Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah			✓			BPPKAD	Januari 2025		
71.	Perbup	Tata Cara Pemungutan Retribusi PBG	Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penagihan Retribusi PBG	✓		2025	Untuk mengatur: 1. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penagihan Retribusi PBG 2. Keberatan akan Ketetapan Retribusi, serta Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi 3. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi 4. Kelebihan Pembayaran Retribusi 5. Pengembalian Kelebihan Pembayaran	DPUTARU	Maret 2025		

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSA NAAN	PENJELASAN	OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERU BAHAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							Retribusi 6. Pelaporan Retribusi Pembukuan dan Pemeriksaan			
72.	Perbup	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Rembang	Rencana Peruntukan Kawasan dan Pengaturan Zonasi	✓		2025	Untuk mengatur: 1. Rencana Struktur Ruang 2. Rencana Pola Ruang 3. Ketentuan Pemanfaatan Ruang 4. Peraturan Zonasi 5. Kelembagaan 6. Ketentuan lain-lain 7. Ketentuan Peralihan	DPUTARU	Juli 2025	



BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ